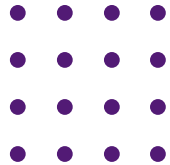


# DINAMIKA KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SDAL

MAGISTER PSDAL PASCASARAJANA

Oleh Prof. Markum  
[www.markumgitu.com](http://www.markumgitu.com)



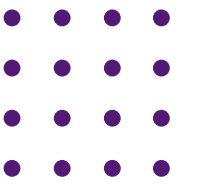


# TUJUAN PEMBELAJARAN

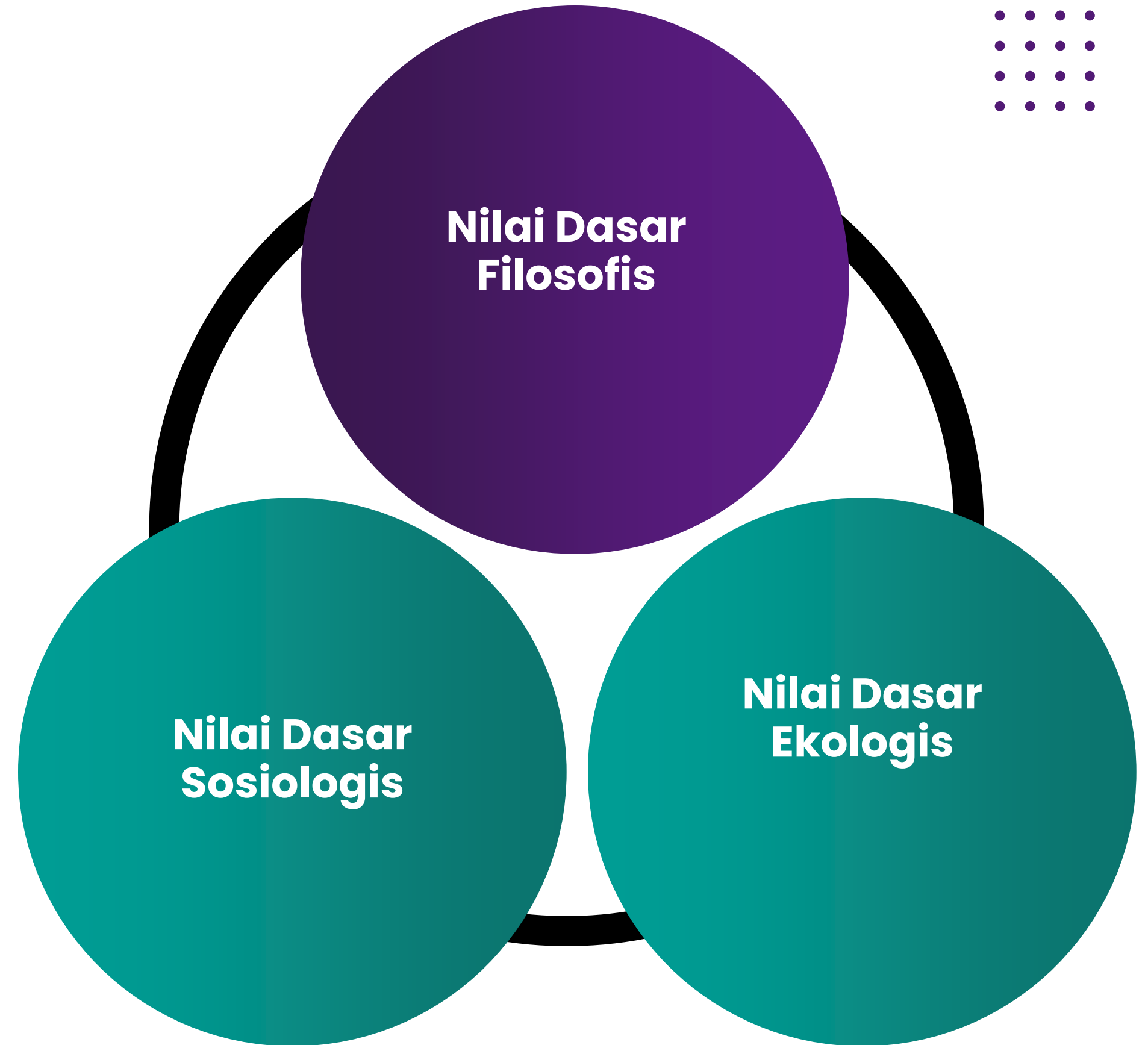
1. Memahami konsep dasar kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA)
2. Menelusuri dinamika perubahan kebijakan dari masa ke masa
3. Menganalisis tantangan implementasi kebijakan SDA di Indonesia
4. Mengidentifikasi arah kebijakan ke depan untuk keberlanjutan



# PENGERTIAN KEBIJAKAN PSDAL



1. Kebijakan SDA adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumber daya alam.
2. Tujuannya: mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bersifat lintas sektor: kehutanan, pertanian, perikanan, energi, air, dan lingkungan hidup.





# PRINSIP DASAR KEBIJAKAN SDAL

Prinsip dasar kebijakan pengelolaan SDAL memerlukan sikap kehati-hatian, mementingkan keadilan dan mewujudkan keberlanjutan.

## KEHATI-HATIAN

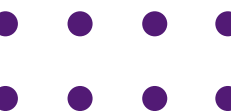
Prinsip kehati-hatian perlu mewaspadai setiap tindakan terkait dengan perubahan sdal akan berdampak pada banyak hal

## KEADILAN

Setiap kebijakan yang dibuat haruslah bermuara pada nilai manfaat yang adil, inklusif dan berdaya guna.

## KEBERLANJUTAN

Kebijakan haruslah meletakkan nilai manfaat SDAL tidak hanya jangka pendek, tetapi yang juga kepentingan generasi akan datang



# HISTORI KEBIJAKAN SDAL DI INDONESIA

## Masa Eksploitasi

Masa orde lama dan orde baru (pemerintahan Soekarna dan Soeharto) yang mendanai pembangunan dengan mengandalkan eksploitasi sumber daya alam

## Masa Desentralisasi

Masa awal reformasi yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan kepada daerah, dan memberikan andil masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan SDAL

## Masa Reorientasi

Masa dimana mulai dilakukan reorientasi kekuasaan desentralisasi kabupaten, menjadi desentralisasi ke provinsi untuk pengelolaan SDAL

## Masa Reorientasi

Masa dimana mulai ada pemikirian untuk memilih alternatif pengelolaan sumberdaya alam lebih berwawasan hijau dengan mengembangkan skema pembangunan integrasi perubahan iklim

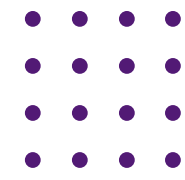
| Periode       | Ciri Utama                         |
|---------------|------------------------------------|
| 1970–1990     | Eksploitasi SDA untuk pembangunan  |
| 1998–2010     | Reformasi & desentralisasi         |
| 2010–2020     | Reorientasi ke lingkungan & sosial |
| 2020–sekarang | Integrasi ekonomi hijau & iklim    |

# PRODUK REGULASI SDAL YANG BERLAKU

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
5. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024](#) tentang Konservasi Sumberdaya dan Ekosistemnya
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

• • • • Konservasi Tanah dan Air  
• • • •  
• • • •  
• • • •





# ISU STRATEGIS

## PENGELOLAAN SDAL

1. Degradasi lingkungan dan deforestasi
2. Ketimpangan akses dan hak atas sumber daya
3. Lemahnya penegakan hukum lingkungan
4. Dampak perubahan iklim



## DINAMIKA KEBIJAKAN KEHUTANAN

1. Dari state-based forestry menuju community-based forestry
2. Lahirnya Perhutanan Sosial (PS) sebagai paradigma baru
3. Kebijakan: PermenLHK No. 9/2021, Perpres No. 28/2023
4. Tujuan: keadilan akses, peningkatan kesejahteraan, dan konservasi hutan

## PERUBAHAN

Perubahan yang paling mendasar adalah dari sistem pengelolaan sentraliste menjadi desentralistis semu

## DINAMIKA KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR

1. UU No. 7/2004 sempat dibatalkan MK, diganti UU No. 17/2019
2. Prinsipnya: Air untuk rakyat, prioritas kebutuhan pokok
3. Pengelolaan DAS menjadi kunci integrasi lahan–air
4. Tantangan: degradasi DAS, urbanisasi, dan alih fungsi lahan

## PERUBAHAN

Perubahan yang terjadi dalam kebijakan sebelumnya dinilai air sebagai barang komersiel

# DINAMIKA KEBIJAKAN ENERGI DAN TAMBANG

1. Pergeseran dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT)
2. Pergeseran kewenangan kebijakan daerah ke pusat
3. Isu penting: transisi energi berkeadilan (just energy transition)
4. Tantangan: investasi, insentif, dan resistensi daerah penghasil

## PERUBAHAN

Perubahan energi fosil ke energi terbarukan namun masih dilematis dengan cost yang tinggi

# DINAMIKA KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PESISIR

1. Dari eksploitasi hasil laut ke sistem budidaya (ekstraktif – cultivatif)
2. Pendekatan blue economy dan konservasi pesisir
3. Kewenangan abu-abu wilayah pesisir dan perairan
4. Tantangan: pencemaran laut, reklamasi, konflik ruang laut

## PERUBAHAN

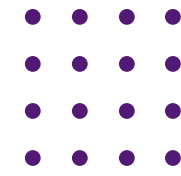
Produk kelautan cenderung ekstraktif, perubahan ke arah yang produktif

# DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM

1. Integrasi isu iklim ke kebijakan nasional
2. Rencana: FOLU Net Sink 2030, RAN-API, dan Low Carbon Development
3. Implementasi di daerah: Sub Nasional Net Sink, RAD API, RPJMD Hijau

## PERUBAHAN

Perubahan dalam target-target penurunan emisi



# ARAH KEBIJAKAN KEDEPAN

- Integrasi tata ruang, air, hutan, dan energi
- Ekonomi hijau dan sirkular
- Digitalisasi dan transparansi data SDA
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis kolaborasi
- Adaptasi terhadap perubahan iklim



# TUGAS

Tugas akan disampaikan menyusul





Universitas Mataram

# TERIMA KASIH



Visit Our Website  
**[www.markumgitu.com](http://www.markumgitu.com)**

